

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

BPTP Lampung
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPTP Lampung adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPTP Lampung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPTP Lampung. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bandar Lampung, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr.Wahyu Wibawa,MP
NIP.196904271998031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.4. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.4. Aset Lainnya

C.4.1. Aset Tak Berwujud

C.4.2. Aset Lain-lain

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

C.6. Ekuitas

C.6.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

- D.2. Beban Pegawai
- D.3. Beban Persediaan
- D.4. Beban Barang dan Jasa
- D.5. Beban Pemeliharaan
- D.6. Beban Perjalanan Dinas
- D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
- D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan
 - E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.3.3. Koreksi Lain-lain
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPTP Lampung yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandar Lampung, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr.Wahyu Wibawa,MP
NIP.196904271998031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPTP Lampung Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp111.692.680,00 atau mencapai 131,40% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp85.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp14.383.897.581,00 atau mencapai 98,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp14.562.162.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp145.308.179.243,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp239.700.000,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp145.058.560.423,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp9.918.820,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp146.116.504.875,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp48.618.424,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp16.191.585.669,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-16.142.967.245,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-17.613.544,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-16.160.580.789,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp146.730.544.531,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-16.160.580.789,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp343.425.000,00 dan Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp-821.085.000,- ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.215.875.501,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp145.308.179.243,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPTP LAMPUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	85.000.000,00	111.692.680,00	131,40	674.948.847,00
Jumlah Pendapatan		85.000.000,00	111.692.680,00	131,40	674.948.847,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	6.825.544.000,00	6.801.009.971,00	99,64	6.679.408.110,00
Belanja Barang	B.4.	6.916.368.000,00	6.762.038.610,00	97,77	46.856.569.656,00
Belanja Modal	B.5.	824.250.000,00	820.849.000,00	99,59	1.799.621.132,00
Jumlah Belanja		14.566.162.000,00	14.383.897.581,00	98,75	55.335.598.898,00

II. NERACA

BPTP LAMPUNG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.2.	0,00	45.640.800,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3.	0,00	-4.564.080,00
Persediaan	C.1.4.	239.700.000,00	138.760.000,00
Jumlah Aset Lancar		239.700.000,00	179.836.720,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	119.368.800.000,00	119.368.800.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	14.447.792.114,00	13.703.531.196,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	21.452.324.963,00	21.816.264.963,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	3.104.127.889,00	3.104.127.889,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	77.559.400,00	82.048.800,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7.	-13.392.043.943,00	-11.528.267.537,00
Jumlah Aset Tetap		145.058.560.423,00	146.546.505.311,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1.	0,00	16.049.520,00
Aset Lain-lain	C.4.2.	593.772.602,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3.	-583.853.782,00	-11.847.020,00
Jumlah Aset Lainnya		9.918.820,00	4.202.500,00
Jumlah Aset		145.308.179.243,00	146.730.544.531,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.5.1.	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		0,00	0,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.	145.308.179.243,00	146.730.544.531,00
Jumlah Ekuitas		145.308.179.243,00	146.730.544.531,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		145.308.179.243,00	146.730.544.531,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

BPTP LAMPUNG LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	48.618.424,00	105.413.942,00
JUMLAH PENDAPATAN		48.618.424,00	105.413.942,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	6.801.009.971,00	6.679.408.110,00
Beban Persediaan	D.3.	1.956.509.500,00	2.520.701.178,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	2.364.392.055,00	4.674.864.617,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	790.867.542,00	798.610.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.857.707.513,00	2.892.345.204,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0,00	29.864.839.670,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	2.425.663.168,00	2.546.188.422,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	-4.564.080,00	4.192.126,00
JUMLAH BEBAN		16.191.585.669,00	49.981.149.327,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-16.142.967.245,00	-49.875.735.385,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	0,00	337.000.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10.	114.300.000,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	98.686.456,00	437.845.405,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10.	2.000.000,00	6.325.400.905,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-17.613.544,00	-5.550.555.500,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-16.160.580.789,00	-55.426.290.885,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPTP LAMPUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	146.730.544.531,00	147.993.706.554,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-16.180.580.789,00	-55.426.290.885,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-477.660.000,00	-497.521.189,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	343.425.000,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	0,00	-495.761.189,00
Koreksi Lain-lain	E.3.3.	0,00	-1.760.000,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	15.215.875.501,00	54.660.650.051,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	145.308.179.243,00	146.730.544.531,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPTP Lampung

BPTP Lampung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan (agar disesuaikan sesuai dengan kebijakan teknis yang ada di instansi masing-masing).

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPTP Lampung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

BPTP Lampung menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPTP Lampung dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPTP Lampung yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPTP Lampung adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPTP Lampung telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	85.000.000,00	85.000.000,00
Jumlah Pendapatan	85.000.000,00	85.000.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.557.425.000,00	6.680.624.000,00
Belanja Lembur	144.920.000,00	144.920.000,00
Belanja Barang Operasional	738.200.000,00	732.440.000,00
Belanja Barang Non Operasional	1.136.570.000,00	1.200.209.000,00
Belanja Barang Persediaan	1.838.098.000,00	1.812.109.000,00
Belanja Jasa	651.000.000,00	553.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	786.350.000,00	792.110.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.570.750.000,00	1.826.000.000,00
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	5.885.250.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	364.250.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	460.000.000,00
Jumlah Belanja	19.458.563.000,00	14.566.162.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp111.692.680,00 atau mencapai 131,40% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp85.000.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	85.000.000	0,00	0,00
Pendapatan Dari Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	0,00	5.423.424,00	0,00
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	0,00	23.235.000,00	0,00
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0,00	19.960.000	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	47.418.520	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	11.402.716	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	4.253.020	0,00
Jumlah	85.000.000,00	111.692.680,00	131,40

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -131,40 % dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada BPTP Lampung adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,00	41.042.500,00	-100
Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	337.000.000,00	-100
Pendapatan Dari Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	5.423.424,00	5.222.442,00	3.84
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	23.235.000,00	29.014.000,00	-19,91
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	19.960.000,00	30.135.000,00	-33,76
Pend. Peny. Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bend. atau Pejabat Lain	47.418.520,00	210.698.700,00	23
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	11.402.716,00	13.205.728,00	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	4.253.020,00	8.630.477,00	49
Jumlah	111.692.680,00	674.948.847,00	17

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp14.383.897.581,00 atau 98,75% dari anggaran belanja sebesar Rp14.566.162.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	6.825.544.000,00	6.801.755.387,00	99,64
Belanja Barang	6.916.368.000,00	6.762.038.610,00	97,77
Belanja Modal	824.250.000,00	820.849.000,00	99,59
Total Belanja Kotor	14.566.162.000,00	14.384.642.997,00	98,75
Pengembalian Belanja		-745.416,00	0,00
Total Belanja	14.566.162.000,00	14.383.897.581,00	98,75

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,18% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belanja Pegawai Mengalami kenaikan berupa : Perubahan Kenaikan Pangkat dan KGB ,uang makan yang disebabkan Pegawai yg Study sudah mulai aktif kembali dan Penambahan CPNS 1 Pegawai dan Pegawai Pindahan
2. Belanja Barang Mengalami kenaikan disebabkan Kegiatan Sesuai Perencanaan
3. Belanja Modal mengalami Penurunan dikarenakan Pagu lebih kecil dan tidak ada Penambahan Pembangunan Gedung dan Bangunan

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	6.801.009.971,00	6.679.408.110,00	1.82
Belanja Barang	6.762.038.610,00	46.856.569.656,00	
Belanja Modal	820.849.000,00	1.799.621.132,00	46
Total Belanja	14.383.897.581,00	55.335.598.898,00	26

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.801.009.971,00 dan Rp6.679.408.110,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami Kenaikan sebesar - 1,82% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Pegawai Mengalami kenaikan dikarenakan Perubahan Kenaikan Pangkat dan KGB ,
2. Uang makan mengalami kenaikan tahun 2019 disebabkan Pegawai yg Study sudah mulai aktif kembali dan penambahan CPNS 1 Orang dan Pegawai Pindahan 1 Orang

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.656.955.387,00	6.480.145.328,00	1,70
Belanja Lembur	144.800.000,00	199.818.000,00	-27.53
Jumlah Belanja Kotor	6.801.755.387,00	6.679.963.328,00	1,82
Pengembalian Belanja Pegawai	-745.416,00	-555.218,00	134
Jumlah Belanja	6.801.009.971,00	6.679.408.110,00	1,82

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.762.038.610,00 dan Rp46.856.569.656,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami penurunan dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Pagu DIPA Lebih kecil dibanding Tahun 2019 dan kegiatan sesuai dengan Perencanaan.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	717.839.600,00	692.530.000,00	103
Belanja Barang Non Operasional	1.164.215.000,00	3.390.068.100,00	34,34
Belanja Barang Persediaan	1.749.071.500,00	2.342.715.465,00	74,66
Belanja Jasa	482.337.455,00	592.266.517,00	81,43
Belanja Pemeliharaan	790.867.542,00	793.010.000,00	99,72
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.857.707.513,00	2.892.345.204,00	
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0,00	36.153.634.370,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	6.762.038.610,00	46.856.569.656,00	-89,90
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	6.762.038.610,00	46.856.569.656,00	-89,90

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp820.849.000,00 dan Rp1.799.621.132,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami penurunan dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Pagu belanja Modal tahun 2019 lebih kecil dari tahun sebelumnya

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.704.000,00	1.408.255.132,00	-74,17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	457.145.000,00	391.366.000,00	16,81
Jumlah Belanja Kotor	820.849.000,00	1.799.621.132,00	-54,39
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	820.849.000,00	1.799.621.132,00	-54,39

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp363.704.000,00 dan Rp1.408.255.132,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami penurunan sebesar -74,17% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Pagu Lebih kecil kebutuhan belanja modal tahun 2019 lebih sedikit

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.704.000,00	1.408.255.132,00	-74,17
Jumlah Belanja Kotor	363.704.000,00	1.408.255.132,00	-74,17
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	363.704.000,00	1.408.255.132,00	-74,17

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp457.145.000,00 dan Rp391.366.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,81% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Kebutuhan belanja modal pada tahun 2019 ada Pembangunan Pagar KP.Natar 455 M2 ,Pembangunan Pagar KP Tegineneng 381 M2 dan Pemasangan Paving Block 297,28 M2 pada Kantor BPTP Lampung

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	457.145.000,00	391.366.000,00	16,81
Jumlah Belanja Kotor	457.145.000,00	391.366.000,00	16,81
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	457.145.000,00	391.366.000,00	16,81

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2019
Kas dibendahara	0,00
Jumlah	0,00

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp45.640.800,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2019

No	Nama Debitur	31 Desember 2019
1.	TGR	0,00
	Jumlah	0,00

C.1.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-4.564.080,00.

Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang

masing-masing debitor. Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Penyisihan Piutang Bagian Lancar TP/TGR
per 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	%	0,00
Jumlah	0,00		0,00

C.1.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp239.700.000,00 dan Rp138.760.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Bahan Baku	10.575.000,00	138.760.000,00
Persediaan Lainnya	229.125.000,00	0,00
Jumlah	239.700.000,00	138.760.000,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp119.368.800.000,00 dan Rp119.368.800.000,00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.447.792.114,00 dan Rp13.703.531.196,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	13.703.531.196,00
Pembelian	363.704.000,00
Transfer Masuk	953.790.600,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	59.490.000,00
Mutasi Kurang Penghentian dari Aset Penggunaan	-632.723.682
Saldo per 31 Desember 2019	14.447.792.114,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-10.651.010.432,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	3.796.781.682,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Penambahan dari Pembelian Peralatan dan Mesin sebesar Rp.363.704.000,-
Berupa : Brankas 1 Bh,Mesin Absen 3 bh,Sice 2 Bh,PC Unit 2 Bh,Laptop 4 Bh,Printer 4 Bh,Scanner 5 Bh,AC 20 Bh
2. Mutasi Tambah berasal dari Transfer Masuk dari kegiatan Kostratani sebesar Rp. 953.790.600,- dari Sekjen berupa : Pesawat Tak Berawak 8 Unit, LCD Projector/Infocus 8 Bh, Televisi 1 Bh, Camera Conference 7 Bh, Handphone 8 Bh, PC Unit 32 Bh, Note Book 1 Bh
3. Mutasi Kurang Penghentian Aset dari Penggunaan Rp.-632.723.682,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp22.273.409.963,00 dan Rp21.816.264.963,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	21.816.264.963,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	457.145.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	21.452.324.963,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-3.018.191.197,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	18.434.133.766,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Penambahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 457.145.000,-
Berupa Pengembangan Pembangunan Pagar KP.Natar 455 M2, Pemasangan Paving Blok 297,28 M2 pada BPTP Lampung, Pembangunan Pagar KP.Tegineneng

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.104.127.889,00 dan Rp3.104.127.889,00.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp77.559.400,00 dan Rp82.048.800,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	82.048.800,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-4.489.400,00
Saldo per 31 Desember 2019	77.559.400,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	77.559.400,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa:

1. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yaitu Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa : Buku Perpustakaan

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya sudah selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-13.392.043.943,00 dan Rp-11.528.267.537,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi

dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	14.447.792.114,00	-10.651.010.432,00	3.796.781.682,00
2.	Gedung dan Bangunan	21.452.324.963,00	-3.018.191.197,00	18.434.133.766,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.104.127.889,00	-269.276.854,00	2.834.851.035,00
4.	Aset Tetap Lainnya	77.559.400,00	0,00	77.559.400,00
Akumulasi Penyusutan		39.081.804.366,00	-13.938.478.483,00	25.143.325.883,00

C.4. ASET LAINNYA

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp16.049.520,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	16.049.520,00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-16.049.520,00
Saldo per 31 Desember 2019	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud adalah berupa:

1. Tidak ada penambahan Aset Tak Berwujud

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Software	0,00
Jumlah	0,00

C.4.2. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp593.772.602,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPTP Lampung serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	593.772.602,00
Saldo per 31 Desember 2019	593.772.602,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	593.772.602,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki BPTP Lampung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-583.853.782,00 dan Rp-11.847.020,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	653.262.602,00	-630.121.038,00	23.141.564,00
Akumulasi Penyusutan		653.262.602,00	-642.286.808,00	10.975.794,00

C.5. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. EKUITAS

C.6. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp145.308.179.243,00 dan Rp146.730.544.531,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp48.618.424,00 dan Rp105.413.942,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	19.960.000,00	30.135.000,00	-33,76
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	23.235.000,00	29.014.000,00	-19,91
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0,00	41.042.500,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.423.424,00	5.222.442,00	3,84
Jumlah	48.618.424,00	105.413.942,00	-53,87

- Pendapatan Hasil Penelitian /Riset dan Hasil Pengembangan Iptek pada tahun 2019 Realisasi menurun disebabkan hasil UPBS belum Panen

- Pendapatan Pengujian,Sertifikasi,Kalibrasi dn Standarisasi Lainnya pada tahun 2019 Realisasi menurun disebabkan Pengujian dari Pihak Swasta dan Perorangan berkurang .

- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian,Perkebunan,Peternakan dan Budiaya Realisasi pada tahun 2019 Nihil dikarnakan jadwal tanam mundur disebabkan kemarau curah hujan sedikit khusus tanaman padi telah ditetapkan petani untuk menanam padi kegiatan produksi benih sumber padi beberapa kali pindah lokasi tanam, karena lahannya yang sudah dijadwalkan dapat giliran air irigasi ternyata tidak dapat giliran sedangkan kegiatan produksi benih sumber kedelai 2 Ha gagal total karena tanaman kekurangan air (kemarau)

- Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan berasal dari Sewa rumah Dinas setoran melalui Potongan SPM Gaji

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.801.009.971,00 dan Rp6.679.408.110,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	4.303.481.780,00	4.134.933.140,00	4,07
Beban Pembulatan Gaji PNS	60.105,00	54.495,00	10,29
Beban Tunj. Anak PNS	88.740.460,00	84.774.499,00	-17,72
Beban Tunj. Beras PNS	209.511.060,00	214.145.940,00	-6,16
Beban Tunj. Fungsional PNS	972.350.000,00	993.970.000,00	-2,17
Beban Tunj. PPh PNS	65.194.686,00	57.942.142,00	12,51
Beban Tunj. Struktural PNS	32.760.000,00	32.760.000,00	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	300.856.030,00	294.166.894,00	2,27
Beban Tunjangan Umum PNS	92.190.000,00	95.860.000,00	-3,82
Beban Uang Lembur	144.800.000,00	199.818.000,00	-27,53
Beban Uang Makan PNS	591.065.850,00	570.983.000,00	3,51
Jumlah	6.801.009.971,00	6.679.408.110,00	1,82

- . Belanja Pegawai Mengalami kenaikan dikarenakan Perubahan Kenaikan Pangkat dan KGB ,Uang makan mengalami kenaikan tahun 2019 disebabkan Pegawai yg Study sudah mulai aktif kembali dan penambahan CPNS 1 Orang dan Pegawai Pindahan 1 Orang

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.956.509.500,00 dan Rp2.520.701.178,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan bahan baku	187.260.000,00	456.764.418,00	-59,00
Beban Persediaan konsumsi	1.769.249.500,00	2.063.936.760,00	-14,27
Jumlah	1.956.509.500,00	2.520.701.178,00	-22,38

- Beban Persediaan konsumsi yang terdiri dari Bahan ATK, fotocopy, saprodi dan lain-lain

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.364.392.055,00 dan Rp4.674.864.617,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Bahan	418.017.000,00	981.223.000,00	-57,39
Beban Barang Non Operasional Lainnya	647.748.000,00	950.395.100,00	-31,84
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	178.960.000,00	153.570.000,00	16,53
Beban Honor Output Kegiatan	98.450.000,00	1.458.450.000,00	-93,24
Beban Jasa Profesi	182.885.000,00	207.900.000,00	-12,03
Beban Keperluan Perkantoran	538.879.600,00	538.960.000,00	-0,01
Beban Langganan Listrik	181.853.291,00	169.138.580,00	7,51
Beban Langganan Telepon	3.609.164,00	4.230.937,00	-14,69
Beban Sewa	113.990.000,00	210.997.000,00	-45,97
Jumlah	2.364.392.055,00	4.674.864.617,00	-49,42

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp790.867.542,00 dan Rp798.610.000,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam

kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101.708.000,00	97.500.000,00	4,31
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	18.357.000,00	18.357.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan	19.450.000,00	19.450.000,00	-2,31
Beban Pemeliharaan Lainnya	113.750.000,00	91.860.000,00	-15,09
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	536.842.542,00	565.843.000,00	-10,26
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	760.000,00	4.800.000,00	-100,00
Beban Persediaan suku cadang	0,00	800.000,00	-100,00
Jumlah	790.867.542,00	798.610.000,00	-9,55

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.857.707.513,00 dan Rp2.892.345.204,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.566.813.930,00	2.370.595.204,00	-33,90
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000,00	21.600.000,00	-2,77
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	142.420.000,00	207.650.000,00	-31,41
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	127.473.583,00	292.500.000,00	-56,41
Jumlah	1.857.707.513,00	2.892.345.204,00	-35,77

Beban perjalanan Dinas pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -35,77 persen dibanding tahun sebelumnya dikarenakan Pagu tahun anggaran 2019 lebih kecil dan tahun 2018 BPTP Mendapat tambahan Kegiatan BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Bekerja)

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp29.864.839.670,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	29.864.839.670,00	-100,00
Jumlah	0,00	29.864.839.670,00	-100,00

Pada tahun 2019 BPTP Lampung tidak ada Barang yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.

D.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.438.422.536,00 dan Rp2.546.188.422,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	637.500,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Software	0,00	637.500,00	-100,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	871.733.889,00	874.383.011,00	-0,30
Beban Penyusutan Irigasi	28.595.788,00	28.595.788,00	0
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	70.527.832,00	70.527.832,00	0
Beban Penyusutan Jaringan	74.018.036,00	74.018.036,00	0
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.065.196,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.390.844.295,00	1.498.026.255,00	-7,15
Jumlah	2.438.422.536,00	2.546.188.422,00	-4,23

D.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-4.564.080,00 dan Rp4.192.126,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-4.564.080,00	4.192.126,00	-208,87
Jumlah	-4.564.080,00	4.192.126,00	-208,87

D.10. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-114.300.000,00	337.000.000,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-2.000.000,00	-6.325.400.905,00	-99,97
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0,00	183.708.700,00	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	70.678.000,00	43.578.000,00	62,19
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	10.575.000,00	188.722.500,00	-100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-114.300.000,00	337.000.000,00	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4.253.020,00	8.630.477,00	-50,72
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	11.402.716,00	13.205.728,00	-13,65
Jumlah	-17.613.544,00	-5.550.555.500,00	-99,46

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp146.730.544.531,00 dan Rp147.993.706.554,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-16.173.340.157,00 dan Rp-55.426.290.885,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp343.425.000,00 dan Rp-497.521.189,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp343.425.000,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

incian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2019.

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Persediaan Lainnya	343.425.000,00
Jumlah	343.425.000,00

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-495.761.189,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.3.3. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-1.760.000,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp15.215.875.501,00 dan Rp54.660.650.051,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.383.897.581,00
Diterima dari Entitas Lain	-111.692.680,00
Jumlah	14.272.204.901,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-111.692.680,00 sedangkan DKEL sebesar Rp14.383.897.581,00.

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp145.308.179.243,00 dan Rp146.730.544.531,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Rekening Bendahara tahun 2018 telah berubah menjadi Nama Rekening (BPG 017 BPTP Lampung)

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- BPTP Lampung mendapat Anggaran DIPA 018.09.02.567517/2018 tgl 05 Desember 2019 pagu sebesar Rp.19.458.563.000 ,Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung mengalami Revisi DIPA
- Revisi ke I No.DIPA 018.09.2 .567517/2018.R tanggal 28-02-2019 Pagu DIPA menjadi Rp.14.442.963.000 Pengurangan Anggaran BEKERJA
- Revisi DIPA ke 2 DIPA 018.09.2 .567517/2018.R tanggal 09-08-2019 Pagu DIPA menjadi Rp.14.442.963.000 Perubahan Rencana Penarikan
- Revisi DIPA ke 3 DIPA 018.09.2 .567517/2018.R tanggal 20-09-2019 Pagu DIPA menjadi Rp.14.442.963.000 Pergesaran Antar Akun Kegiatan Upsus,Sapira, Diseminasi Inovasi Teknologi Peternakan,Peningkatan IP dan KKID
- Revisi DIPA ke 4 DIPA 018.09.2 .567517/2018.R tanggal 21-10-2019 Pagu DIPA menjadi Rp.14.442.963.000 Perubahan KPA
- Revisi DIPA ke 5 DIPA 018.09.2 .567517/2018.R tanggal 08-11-2019 Pagu DIPA menjadi Rp.14.566.162.000 Penambahan Pagu Anggaran Gaji
- Revisi DIPA ke 6 DIPA 018.09.2 .567517/2018.R tanggal 08-11-2019 Pagu DIPA menjadi Rp.14.566.162.000 Perubahan Antar Akun pada Anggaran gaji karena Pagu Minus
- BPTP Lampung mendapat TP/TGR sebesar Rp.119.890.800, terdiri dari :
- PNBPN tertunda pada Kegiatan Produksi Benih Padi dan kedelai senilai Rp.45.500.000,- dan telah di Setor ke Kas Negara pada tanggal 28 November 2017 NTPN No.OD6296U8G4SN3FSO
- Penggunaan Anggaran yang tidak benar Senilai Rp.4.000.000, telah disetor ke Kas Negara

- Pertanggungjawaban keuangan yg tidak benar terhadap pembayaran yang Tidak didukung kwitansi senilai Rp.9.490.000,- telah disetor ke Kas Negara
- Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja selama 29 bulan Rp.60.900.800, sudah diangsur dan disetor ke Kas Negara pada bulan Desember 2019 telah Lunas
- Meidaliantisyah,SP Tgl 07-02-2018 Rp.1.760.000,-
- Dr.Nandari DS setoran Rp. 34.257.600,-
- Dr. Nila Wardani setoran Rp.24.883.200,-

F.3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor: 023/BALAP.5/2015 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung pada tanggal 1 Januari 2018 tidak ada penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dr. Ir. Wahyu Wibawa, MP
Pejabat Pembuat Komitmen	: Desmarita Sary, SP
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Drs. Dani Purwadi
Bendahara	: Yulis Aisyah